

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat merupakan tindakan yang perlu dilaksanakan akibat masih banyaknya fenomena ketidakberdayaan masyarakat yang menjadi sumber permasalahan dalam pembangunan di kawasan pedesaan. Ketidakberdayaan ini dapat dilihat dari kelompok yang paling kecil yakni keluarga maupun kelompok yang besar yaitu kelompok-kelompok masyarakat. Adanya permasalahan tersebut perlu sekiranya upaya yang dilakukan untuk meminimalisir permasalahan yang ada, salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat (Afifullah, 2017:24).

Menurut Edi Suharto (2005:56) pemberdayaan masyarakat adalah aktivitas yang dilakukan untuk memperkuat kekuasaan kelompok lemah dalam masyarakat dengan memberikan motivasi, dorongan, dan memberikan kesadaran mengenai potensi yang dimiliki dan mengupayakan perkembangan potensi menjadi tindakan yang nyata. Pemberdayaan masyarakat merupakan satu proses pembangunan dalam pembangunan sosial ekonomi untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan sebagai sebuah proses merujuk pada konsep kemampuan untuk berpartisipasi, memperoleh kesempatan untuk mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas hidup (baik secara individual, kelompok, dan masyarakat dalam arti luas). Melalui pemahaman tersebut pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang terencana untuk meningkatkan skala utilitas dari objek yang diberdayakan.

Pemberdayaan masyarakat sendiri terdiri dari beberapa program dan kegiatan, sebagai contoh PNPM Mandiri, pemberdayaan pemanfaatan hasil hutan mangrove, pemberdayaan pemanfaatan hasil perikanan, termasuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata merupakan salah satu pembangunan pariwisata yang dimulai sejak tahun 2009 di Indonesia dan mendapatkan respon yang baik dari pemerintah desa, dibuktikan dengan jumlah desa wisata yang semakin meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik tercatat peningkatan jumlah desa wisata di Indonesia dari tahun 2014 sebanyak 1.302 desa wisata, pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebanyak 1.734 desa wisata, dan pada tahun 2021 sebanyak 1.831 desa wisata.

Desa wisata merupakan pengembangan suatu wilayah desa yang pada dasarnya tidak merubah apa yang sudah ada, akan tetapi lebih cenderung kepada pengembangan potensi desa yang ada dengan melakukan pemanfaatan kemampuan unsur-unsur yang ada di dalam desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata dalam skala kecil menjadi rangkaian aktivitas atau kegiatan pariwisata dan mampu menyediakan serta memenuhi serangkaian kebutuhan perjalanan wisata baik dari aspek daya tarik maupun sebagai fasilitas pendukung (Muljadi, 2012:12). Pengembangan desa wisata di Indonesia dalam perkembangannya berhasil menyumbangkan sebesar 30% dari pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang didasarkan pada kumpulan *bigdata* dari berbagai sumber (Solopos.com). Pengembangan desa wisata juga mempunyai dampak yang baik bagi masyarakat yang dibuktikan dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Hary Hermawan pada tahun 2016 di Desa Nglanggeran menemukan bahwa pengembangan desa wisata mempunyai dampak yaitu meningkatkan penghasilan masyarakat, meningkatkan peluang kerja dan berwirausaha, meningkatkan kepemilikan dan kontrol masyarakat, dan meningkatkan

pendapatan pemerintah melalui retribusi wisata. Penelitian yang dilakukan oleh Falahudin dan Mukhlis pada tahun 2022 mengenai dampak ekonomi pengembangan Desa Wisata Jambu, menemukan bahwa pengembangan desa wisata mempunyai dampak yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat, terserapnya masyarakat untuk bekerja di sektor pariwisata dan masyarakat membuka usaha baru di area wisata, perbaikan jalan raya, keterawatan fasilitas umum, dan retribusi tiket yang diterima pemerintah desa. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengembangan desa wisata mempunyai dampak yang baik terhadap pendapatan masyarakat, meningkatkan taraf hidup masyarakat, menyerap tenaga kerja, meningkatkan fasilitas umum, dan mendorong masyarakat untuk berwirausaha.

Desa wisata yang ada di Indonesia contohnya yaitu Desa Wisata Panglipuran Kabupaten Bangli yang mempunyai daya tarik wisata dengan pola tata ruang desa, arsitektur rumah penduduk, hutan bambu yang didalamnya memiliki beragam jenis bambu, adat istiadat masyarakat lokal, makanan dan minuman tradisional, dan kerajinan bambu khas desa. Pengembangan Desa Wisata Panglipuran melibatkan partisipasi dari masyarakat dengan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat diwujudkan dalam menyediakan berbagai fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama berada di destinasi wisata, fasilitas pendukung berupa atraksi budaya, warung yang menyediakan makanan, minuman, dan cinderamata, *homestay*, serta penggunaan tenaga kerja dari masyarakat setempat (Andriyani, 2015:7). Desa wisata Panglipuran sebelum pandemi Covid-19 berhasil menyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Bangli sebesar Rp.4,4 miliar pada tahun 2018 yang didapatkan dari penjualan *souvenir*, *homestay*, tiket, dan atraksi paket wisata (bali.tribunnews.com).

Kabupaten Purworejo sendiri mempunyai beberapa desa wisata, salah satunya yaitu Desa Wisata Kaligono (Dewi Kano) yang merupakan salah satu desa wisata unggulan di Kabupaten Purworejo dengan potensi-potensi yang dapat dikembangkan. Potensi wisata Desa Kaligono antara lain yaitu wisata alam Curug Siklothok dan Taman Sidandang, potensi hasil pertanian buah manggis, durian, dan kelapa, wisata religi makam Mbah Bei, dan Wisata Seni dan budaya seperti tari ndolalak, kuda lumping, sayor maole/hadroh, tari srunthul, dan karawitan. Selain itu Desa Wisata Kaligono juga mencapai rata-rata jumlah pengunjung tertinggi di Kabupaten Purworejo dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Jumlah pengunjung desa wisata di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel 1.1. sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Jumlah Pengunjung Desa Wisata Kabupaten Purworejo

No	Desa Wisata	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Desa Wisata Benowo	14.390	8.203	363	50
2	Desa Wisata Donorejo	3.672	2.007	1.133	-
3	Desa Wisata Kaligono	74.327	17.779	30.803	4.187
4	Desa Wisata Karangrejo	1.062	312	-	685
5	Desa Wisata Somongari	5.730	7.756	8.319	430
6	Desa Wisata Tlogoguwo	25.176	36.869	13.419	2.186

Sumber: Draft Buku Pariwisata Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2017-2020

Berdasarkan pada tabel 1.1 dapat dilihat pada tahun 2017 Desa Wisata Benowo terdapat sebanyak 14.390 pengunjung, Desa Wisata Donorejo sebanyak 3.672 pengunjung, Desa Wisata Kaligono sebanyak 32.722 pengunjung, Desa Wisata Karangrejo sebanyak 1.062 pengunjung, Desa Wisata Somongari sebanyak 5.730 pengunjung, dan Desa Wisata Tlogoguwo sebanyak 25.176 pengunjung. Pada tahun 2018 Desa Wisata benowo terdapat sebanyak 8.203 pengunjung, Desa Wisata Donorejo sebanyak 2.007 pengunjung, Desa Wisata Kaligono sebanyak 17.779 pengunjung, Desa Wisata Karangrejo sebanyak 312 pengunjung, Desa Wisata Somongari sebanyak 7.756, dan Desa Wisata Tlogoguwo sebanyak 36.869 pengunjung. Pada tahun 2019 Desa Wisata Benowo terdapat 363 pengunjung, Desa Wisata Donorejo sebanyak 1.133 pengunjung, Desa Wisata Kaligono sebanyak 20.803 pengunjung, Desa Wisata Karangrejo tidak ada pengunjung, Desa Wisata Somongari sebanyak 8.319 pengunjung, dan Desa Wisata Tlogoguwo sebanyak 13.419 pengunjung. Pada tahun 2020 Desa Wisata Benowo terdapat sebanyak 50 pengunjung, Desa Wisata Donorejo tidak ada pengunjung, Desa Wisata Kaligono sebanyak 4.187 pengunjung, Desa Wisata Karangrejo sebanyak 685 pengunjung, Desa Wisata Somongari sebanyak 425 pengunjung, dan Desa Wisata Tlogoguwo sebanyak 2.186. Dari tabel 1.1 yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Desa Wisata Kaligono merupakan desa wisata yang mempunyai rata-rata jumlah pengunjung terbanyak di Kabupaten Purworejo.

Keberhasilan Desa Wisata Kaligono dengan jumlah pengunjung desa wisata rata-rata terbanyak di Kabupaten Purworejo tidak terlepas dari usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa yang bekerjasama dengan masyarakat. Usaha yang telah dilakukan yaitu melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan yaitu dengan mendorong masyarakat agar mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi melalui pemanfaatan potensi-potensi sumber daya yang dimiliki. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Kaligono sendiri dilatarbelakangi oleh potensi wisata alam yang dimiliki belum dimanfaatkan dengan baik sehingga pengunjung cenderung melakukan kerusakan, masih banyaknya pemuda yang belum bekerja, dan kurangnya kesadaran dan dukungan masyarakat dalam kegiatan pariwisata. Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata juga memiliki tujuan yaitu untuk mengelola kawasan wisata Desa Kaligono agar dapat lebih menarik wisatawan, meningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan kesadaran kepada masyarakat agar dapat mendukung kegiatan disektor pariwisata, dan agar masyarakat dapat mandiri.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan di Desa Wisata Kaligono berhasil mendapatkan beberapa prestasi diantaranya yaitu mendapatkan 10 besar desa wisata terbaik tingkat nasional pada tahun 2014, juara 1 desa wisata tingkat Kabupaten Purworejo pada tahun 2019, juara 1 penampilan *stand* terbaik desa wisata tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019, dan juara 4 festival desa wisata tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 (dokumen Desa Wisata Kaligono).

Terlepas dari beberapa prestasi yang telah diperoleh Desa Wisata Kaligono, program pemberdayaan yang telah dilaksanakan belum optimal. Pemberdayaan masyarakat belum optimal karena adanya indikasi permasalahan yang ada pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dapat dilihat dari kurang terawatnya fasilitas yang ada di kawasan Desa Wisata Kaligono

sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh pengunjung dan lingkungan objek wisata yang kurang bersih dengan banyaknya sampah daun yang berserakan yang berakibat pada banyaknya nyamuk yang membuat pengunjung merasa kurang nyaman. Kondisi tidak terawatnya objek wisata tentunya berbanding terbalik dengan prestasi-prestasi yang didapatkan oleh Desa Wisata Kaligono. Kondisi objek wisata Desa Kaligono yang tidak terawat dapat dilihat pada gambar 1.1. dan gambar 1.2. sebagai berikut:

Gambar 1.1. Kondisi Objek Wisata Taman Sidandang Desa Kaligono



Sumber: observasi peneliti pada 10 Juli 2022

Gambar 1.2. Kondisi Objek Wisata Curug Siklothok Desa Kaligono



Sumber: observasi peneliti pada 10 Juli 2022

Kondisi objek wisata yang saat ini tidak terlalu terawat dan kurangnya kebersihan di lingkungan objek wisata juga berakibat pada daya tarik wisata yang berkurang. Berkurangnya daya tarik wisata di Desa Kaligono dibuktikan dengan penurunan jumlah pengunjung yang dapat dilihat dari tabel 1.2. sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Jumlah Pengunjung Desa Wisata Kaligono

Tahun	Jumlah Pengunjung
2017	74.327
2018	17.779
2019	30.803
2020	4.187

Sumber : Data Desa Wisata Kaligono

Berdasarkan tabel 1.2. dapat dilihat jumlah pengunjung Desa Wisata Kaligono yaitu pada tahun 2017 terdapat 74.327 pengunjung, tahun 2018 sebanyak 17.779 pengunjung, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu jumlah pengunjung pada tahun 2019 sebanyak 30.802 pengunjung, dan pada tahun 2020 kembali menurun dengan jumlah pengunjung yaitu sebanyak 4.187 pengunjung.

Penurunan jumlah pengunjung Desa Wisata Kaligono tentunya mempunyai dampak terhadap pemasukan yang didapat oleh Desa Wisata Kaligono, selain itu tingkat keaktifan dari anggota pengurus Desa Wisata Kaligono yaitu kelompok sadar wisata dan badan pengelola desa wisata juga mengalami penurunan dalam jumlah anggota dan keaktifan, hal tersebut dikarenakan masyarakat mempunyai kesibukan dengan pekerjaan utama mereka dan adanya penurunan pemasukan yang di dapat Desa Wisata Kaligono. Berdasarkan wawancara pra survey yang telah dilakukan dengan Bapak Ari Wibowo yang merupakan ketua Badan Pengelola Desa Wisata Kaligono mengatakan:

“saat ini jumlah pengunjung Desa Wisata Kaligono sendiri mengalami penurunan yang juga berimbas pada penurunan pemasukan yang di dapat. Anggota Pokdarwis dan BPDW dalam partisipasi dan keaktifan mengalami penurunan karena mempunyai kesibukan di dalam pekerjaan utamanya dan adanya penurunan pemasukan Desa Wisata Kaligono”.

Berdasarkan latar belakang mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Kaligono yang telah dijelaskan, maka dapat diidentifikasi masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Fasilitas objek wisata di kawasan Desa Wisata Kaligono kurang terawat dan kebersihan lingkungan objek wisata juga kurang terjaga sehingga menurunkan daya tarik wisata
2. Penurunan tingkat partisipasi dan keaktifan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Kaligono

Berdasarkan pada permasalahan pemberdayaan masyarakat di Desa Kaligono yang telah dijelaskan, maka pada kesempatan kali ini peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana pemberdayaan masyarakat Desa Kaligono yang telah dilakukan dengan melihat pada tahap-tahap pemberdayaan masyarakat karena adanya indikasi permasalahan di dalam tahap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Kaligono. Menurut Suparjan dan Hempri S (2003:44). dalam memberdayakan masyarakat dibutuhkan tahap pemberdayaan yang jelas dan terarah, hal yang perlu untuk dilakukan dalam tahap-tahap pemberdayaan yaitu meningkatkan kesadaran kritis atau posisi masyarakat dalam struktur sosial politik, mampu membuat argumentasi terhadap berbagai macam eksploitasi, peningkatan kapasitas masyarakat, dan meningkatkan sosial budaya masyarakat. Menurut Ambar Teguh S (2004:83) Pemberdayaan masyarakat merupakan rangkaian proses pembelajaran untuk mencapai kemandirian yang ditempuh melalui tahap-tahap pemberdayaan. Berdasarkan pada penjelasan tersebut dapat

disimpulkan bahwa tahap-tahap pemberdayaan masyarakat merupakan rangkaian kegiatan yang penting untuk dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang direncanakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Kaligono Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat disusun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tahap-tahap pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata Kaligono Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo?
2. Apa saja aspek-aspek pendukung dan aspek-aspek penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Kaligono Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis tahap-tahap pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Kaligono Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo.
2. Mengetahui aspek-aspek pendukung dan aspek-aspek penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Kaligono Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis

Memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata.

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata.

2. Kegunaan secara Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Desa Kaligono dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata.

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk melakukan perbaikan di dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata.

1.5. Kajian Teori

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.3. Penelitian Terdahulu

Jurnal	Artikel dan Penulis	Tujuan	Temuan	Perbedaan dan/ Persamaan
<i>Jurnal pusat inovasi masyarakat</i>	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Sukawening (Dyah Istiyanti)	Mengkaji berlangsungnya proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Sukawening yang meliputi bentuk pemberdayaan masyarakat dan hasil pemberdayaan masyarakat yang dilakukan	Program pemberdayaan masyarakat melalui proses penyadaran kepada masyarakat mengenai potensi wisata desa yaitu pengajian, panahan, dan permainan alat musik kerinding. Setelah masyarakat sadar dengan potensi desa pemerintah desa membentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Kemudian proses transformasi kemampuan dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan yang mempunyai tujuan untuk membekali masyarakat tentang pengelolaan desa wisata dan ilmu penunjang dalam mengembangkan desa wisata. Setelah diberikan transformasi kemampuan, kemudian dilakukan peningkatan kemampuan intelektual yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif sehingga masyarakat dapat mandiri.	Penelitian ini dilakukan dengan melihat potensi masyarakat serta potensi wisata alam sebagai penunjang pengembangan desa wisata dengan melalui pemberdayaan kepada masyarakat. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu melihat berlangsungnya proses pemberdayaan yang meliputi proses pemberian penyadaran, transformasi kemampuan, dan peningkatan kemampuan intelektual. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk menganalisa terhadap pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dengan melihat pada tahap-tahap yang dilakukan mulai dari seleksi lokasi/wilayah, sosialisasi, pelaksanaan program, sampai dengan evaluasi. Partipasi masyarakat dalam tahap-tahap pemberdayaan masyarakat dimaksudkan agar masyarakat dapat mandiri.

Jurnal	Artikel dan Penulis	Tujuan	Temuan	Perbedaan dan/ Persamaan
<i>Jurnal masalah-masalah sosial</i>	Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas dalam Program Desa Wisata Jogoboyo Purworejo (Yohanes Putut W)	Menggambarkan proses pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Wisata Jogoboyo Purworejo dengan melihat strategi perencanaan dan pengembangan kawasan wisata serta melihat dampak yang muncul dalam pengembangan kawasan wisata tersebut	Pemberdayaan menggunakan sistem <i>community base tourism</i> memberikan dampak positif dimana terdapat kemajuan pola pikir ekonomi, penambahan mata pencaharian baru, peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan serta perubahan cara dan perilaku kerja, namun masih diperlukan peningkatan SDM lokal untuk memanfaatkan media sosial, selain itu juga diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat desa setempat.	Persamaan dengan penelitian ini tidak melihat pendekatan dengan sistem <i>community based tourism</i> , namun melihat bagaimana tahap-tahap pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan desa wisata Kaligono Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo yang dijalankan agar dapat mencapai tujuan yang telah disepakati serta melihat apa saja aspek pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat yang dijalankan di Desa Wisata Kaligono

Jurnal	Artikel dan Penulis	Tujuan	Temuan	Perbedaan dan/ Persamaan
<i>Jurnal ekonomi, sosial, dan humaniora</i>	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Koja Doi (Marsudi, Nur C, Nurdin, dan Rahman)	Mendeskripsikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata, bentuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata, Hasil dari pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata	Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata melalui tiga tahap yaitu penyadaran yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait manfaat pembangunan wisata, posisi dan peran masyarakat, pemberian sadar wisata dan sapta pesona, dan menumbuhkan kemampuan penerapan sapta pesona. Tahap kedua yaitu transformasi kemampuan dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat yang meliputi pelatihan pengelolaan desa wisata, pelatihan SOP, kependidikan, kewirausahaan, pelatihan tata boga. Tahap ketiga yaitu peningkatan kemampuan intelektual dengan melihat dari berbagai kegiatan pemberdayaan, dilaksanakannya pemberdayaan masyarakat menghasilkan peningkatan keterampilan dan kemandirian masyarakat dari aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek kultural. Hasil dari pemberdayaan melalui pengembangan desa wisata yaitu meningkatnya keterampilan dan kemandirian masyarakat, berkembangnya pengelolaan desa wisata Koja Doi, dan tergalinya sumber daya alam dan budaya secara maksimal.	Penelitian ini mempunyai persamaan yaitu melihat tahap-tahap dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata yaitu dengan melakukan penyadaran, transformasi kemampuan, dan peningkatan kemampuan intelektual, namun mempunyai perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengkaji ulang pemberdayaan masyarakat dengan melihat beberapa tahapan yaitu seleksi lokasi/wilayah, sosialisasi, pelaksanaan program, dan evaluasi. Selain itu persamaan dengan penelitian ini yaitu melihat bagaimana memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, dan melihat hasil dari pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata yang dijalankan.

Jurnal	Artikel dan Penulis	Tujuan	Temuan	Perbedaan dan/ Persamaan
<i>Journal of Nonformal Education Community Empowerment</i>	Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata Organik di Kabupaten Bondowoso (Deditani, Lutfi, Dinar)	Mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat Desa Lombok Kulon melalui Pengembangan Desa Wisata Organik	Pemberdayaan masyarakat dengan mengelola potensi fisik dan nonfisik mampu membuat masyarakat lebih berdaya yaitu dilihat dari tercapainya partisipasi dan kontrol. Bentuk dari partisipasi masyarakat adalah turut terlibatnya masyarakat dalam mendukung program desa wisata organik yang terlihat dari telah terjadinya proses kesadaran pada masyarakat dan telah terjadi proses transformasi dalam dirinya. Sedangkan bentuk kontrol dari masyarakat adalah penyampaian aspirasi yang berupa kritik, saran dan evaluasi pada sebuah forum diskusi.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu memanfaatkan potensi yang ada, memberikan kesadaran dan transformasi pada masyarakat, serta melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata, namun mempunyai perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya melihat hasil dari pemberdayaan masyarakat, akan tetapi juga mengkaji bagaimana tahap-tahap pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan melihat pada empat tahapan yaitu tahap seleksi lokasi/wilayah, tahap sosialisasi, tahap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, dan tahap evaluasi.

Jurnal	Artikel dan Penulis	Tujuan	Temuan	Perbedaan dan/ Persamaan
<i>Jurnal NATAPRAJA</i>	Pemberdayaan Masyarakat Mantan Buruh Migran Korban <i>Trafficking</i> di Kabupaten Wonosobo oleh Tissa dan Sugi (2017)	Mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat buruh migran di Kampung Buruh Migran Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro, Wonosobo	Penelitian ini menemukan pemberdayaan masyarakat dibedakan menjadi dua yaitu melalui penguatan ekonomi dan penguatan kapasitas. Pemberdayaan dilakukan dengan tujuh tahapan yaitu tahap persiapan, <i>assessment</i>, perencanaan, perumusan rencana aksi, pelaksanaan, evaluasi, dan terminasi. Pemberdayaan melalui penguatan ekonomi dibidang koperasi dan simpan pinjam sudah berhasil namun dalam bidang peternakan dan pertanian, sedangkan dalam penguatan kapasitas, pelatihan dan sosialisasi belum berjalan efektif. Faktor penghambat yaitu kualitas SDM yang masih rendah, kurangnya koordinasi dengan pemerintah, masyarakat berharap bantuan yang diberikan berupa uang atau barang, dan peran pemerintah dalam keberlanjutan program masih kurang.	Penelitian ini menggunakan tujuh tahapan pemberdayaan, sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis tidak menggunakan tujuh tahapan pemberdayaan. Peneliti ini juga membagi pemberdayaan menjadi dua yaitu penguatan ekonomi dan penguatan kapasitas, sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis tidak. Namun terdapat kesamaan yaitu melihat faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat.

Jurnal	Artikel dan Penulis	Tujuan	Temuan	Perbedaan dan/ Persamaan
<i>Jurnal Caraka Pravu</i>	Pengembangan Masyarakat melalui Pengolahan Limbah Karpet di Desa Cikaobandung Chandara Krisna D (2020)	Studi ini melihat bagaimana kegiatan yang dilalui dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengolahan Limbah Karpet di Desa Cikaobandung	Studi ini mengungkapkan tahap-tahap pemberdayaan masyarakat melalui empat tahapan yaitu seleksi lokasi/wilayah, sosialisasi pemberdayaan, proses pemberdayaan masyarakat, dan pemandirian masyarakat. hasil dari studi ini menunjukkan bahwa masyarakat mengalami peningkatan penghasilan dengan adanya pemberdayaan tersebut dan juga tercapainya kemandirian masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada serta menumbuhkan potensi baru dalam masyarakat.	Persaman dengan penelitian ini yaitu melihat tahap-tahap pemberdayaan masyarakat melalui empat tahapan diantaranya seleksi lokalisasi/wilayah, sosialisasi pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan masyarakat, dan pemandirian masyarakat. selain itu juga terdapat kesamaan dalam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu memandirikan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta menimbulkan potensi baru dalam masyarakat. Namun dalam penelitian yang dilakukan penulis hampir sama yaitu menggunakan tahapan pemberdayaan melalui seleksi lokasi/wilayah, sosialisasi, pelaksanaan program, dan evaluasi.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang telah dijabarkan pada tabel 1.2 penulis menemukan kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu upaya dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dan tujuan pemberdayaan masyarakat dengan melihat pada tahap-tahap pemberdayaan masyarakat. Penelitian terdahulu memberikan manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai referensi mengenai teori pemberdayaan masyarakat, tahap-tahap pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan desa wisata. Penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan pada bagaimana tahap-tahap yang dilaksanakan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Kaligono berdasarkan pada empat tahapan yaitu seleksi lokasi/wilayah, sosialisasi, pelaksanaan program, dan evaluasi. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Kaligono mempunyai tujuan yaitu untuk memanfaatkan potensi wisata alam yang dimiliki agar dapat menarik wisatawan, membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai alternative pendapatan bagi masyarakat, menjadikan Desa Wisata Kaligono sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Purworejo khususnya di Kecamatan Kaligesing, dan menjadikan Desa Kaligono yang nyaman dan aman bagi wisatawan.

1.5.2. Administrasi Publik

Administrasi secara etimologi berasal dari Bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu *ad* dan *ministrate* yang berarti *to serve* yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Administrasi adalah proses pelayanan atau pengaturan. Publik pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu *public* yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak, dan rakyat.

Beberapa ahli memberikan definisi pada administrasi publik diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Chandler dan Plano (dalam Pasolong, 2014:7) administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.
- b. Menurut Nicholas Henry (dalam Pasolong, 2014:8) administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial.
- c. Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (dalam Pasolong, 2014:8) mendefinisikan administrasi publik adalah (1) meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik (2) koordinasi usaha-usaha perseorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah, dan (3) suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan, kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, serta memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Berdasarkan pada definisi administrasi publik oleh para ahli penulis menyimpulkan bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

1.5.3. Paradigma Administrasi Publik

Menurut Nicholas Henry (dalam Pasolong, 2014:28) administrasi publik mengalami perkembangan paradigma yang sesuai dengan perkembangan zaman, Henry mengemukakan lima paradigma administrasi publik dan satu paradigma sebagai berikut:

1. Paradigma Dikotomi Politik Administrasi (1990-1926)

Lokus dari paradigma dikotomi politik administrasi adalah menempatkan di mana seharusnya administrasi publik ini berada. Pada masa ini dibedakan dengan jelas antara administrasi dan politik negara. Paradigma ini menjelaskan terdapat dua fungsi yaitu politik dan administrasi. Politik memusatkan perhatian terhadap kebijakan dari kehendak rakyat. Pemisah administrasi dan politik dimanifestasikan oleh pemisah antara badan legislatif yang bertugas mengekspresikan kehendak rakyat, badan eksekutif yang mengimplementasikan kehendak rakyat, dan badan yudikatif membantu badan legislatif menentukan tujuan dan merumuskan kebijakan. Fokus dari ilmu administrasi publik dalam paradigma ini terbatas pada masalah-masalah organisasi, kepegawaian, dan penyusunan anggaran dalam birokrasi dan pemerintahan.

2. Paradigma Prinsip-prinsip Administrasi Negara (1927-1937)

Lokus pada paradigma prinsip-prinsip administrasi negara tidak menjadi masalah, karena yang penting adalah fokusnya yaitu prinsip-prinsip administrasi. Pada masa ini administrasi memiliki prinsip-prinsip yang jelas. Prinsipnya adalah administrasi negara dapat diterapkan di negara mana saja walaupun berbeda kebudayaan, lingkungan, visi, dan lainnya. Prinsip administrasi yang terkenal dari Gulick dan Urwick (dalam Pasolong 2014:29) adalah POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*).

3. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Administrasi negara bukanlah sesuatu yang bebas nilai yang dapat berlaku dimana saja, namun administrasi negara tentu dipengaruhi oleh nilai-nilai. Pada titik ini terjadi persinggungan antara nilai administrasi negara dan nilai politik. Umar (dalam Pasolong 2014: 29) menyebut bahwa pada fase ini administrasi negara telah berkembang sebagai bagian dari ilmu politik. Terdapat dua perkembangan baru yaitu (1) tumbuhnya penggunaan studi kasus sebagai suatu sarana yang bersifat epistemologi, (2) timbulnya studi perbandingan dan pembangunan administrasi sebagai salah satu bagian dari ilmu administrasi.

4. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1954-1970)

Paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi mencoba untuk mengkaji kembali secara ilmiah dan mendalam prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya. Fokus dari paradigma ini adalah perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern, analisis sistem dan sebagainya. Pada masa ini administrasi negara dapat dikatakan telah berkembang sebagai ilmu administrasi. Administrasi negara sebagai suatu paradigma hanya memberikan fokus, tetapi tidak pada lokusnya.

5. Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-Sekarang)

Paradigma ke 5 yaitu administrasi publik sebagai administrasi publik, pada paradigma ini sudah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus administrasi publik yaitu teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik, sedangkan lokus paradigma ini adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik. Paradigma ini menjelaskan mengenai fokus yang akan dipelajari di dalam studi Administrasi Publik dan juga lokus atau tempat dimana teori itu dapat diimplementasikan. Kejelasan antara fokus dan lokus dalam paradigma ini mengakibatkan adanya keterkaitan antara berbagai teori-teori yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah publik.

6. Paradigma *Governance* (1990-sekarang)

Paradigma *governance* merupakan paradigma yang populer pada tahun 1990-an. Paradigma ini menempatkan pemerintahan tidak hanya sebagai suatu kegiatan saja namun juga pemerintahan sebagai pihak yang menjalankan fungsi sebagai pengolah, pengarahan, dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (Pasolong, 2017:243). Menurut G. Shabbir Cheema (dalam Keban, 2014 : 38) *governance* merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan yang melibatkan tiga unsur yaitu pemerintahan, swasta, dan masyarakat. Paradigma ini menurut Cheema mengutamakan kepentingan masyarakat, dengan pemerintah menjalankan perannya untuk menciptakan lingkungan politik dan produk hukum agar kondusif, sedangkan swasta memiliki peran untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan.

Berdasarkan penjelasan mengenai paradigma administrasi publik penulis menyimpulkan bahwa ilmu administrasi publik mengalami perkembangan dengan penyesuaian zaman atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perubahan paradigma menggambarkan adanya perubahan teori dan orientasi dimana setiap paradigma mempunyai perbedaan-perbedaan. Perubahan paradigma yang terjadi merupakan respon dari adanya permasalahan yang ada di masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai upaya untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat dengan melalui pengkajian masalah yang didasari pada teori dari para ahli.

1.5.4. Manajemen Publik

1.5.4.1. Pengertian Manajemen Publik

Menurut James A. Stoner (dalam Handoko, 2009:8) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya dalam organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan definisi tersebut terlihat bahwa Stoner telah menggunakan manajemen sebagai proses bukan seni. Manajemen didefinisikan sebagai proses, karena semua manajer tanpa memperdulikan kecakapan atau keterampilan khusus, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

Luther Gulick (dalam Handoko, 2009:11) mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerjasama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama agar lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Menurut Gulick manajemen telah memenuhi persyaratan untuk disebut bidang ilmu pengetahuan, karena telah dipelajari dalam waktu yang lama dan telah diorganisasi menjadi suatu rangkaian teori.

Overman (dalam Keban, 2015:92) menyebutkan bahwa manajemen publik bukanlah *scientific management*, meskipun sangat dipengaruhi olehnya. Manajemen publik bukan *policy analysis*, bukan juga “administrasi publik baru” atau kerangka yang lebih baru. Manajemen publik merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi rasional-instrumental pada satu pihak dan orientasi politik di pihak lain. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi yang merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* dari satu sisi dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, serta politik di sisi lain.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli, penulis menyimpulkan bahwa manajemen publik merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Manajemen publik mengatur bagaimana mengelola sumber daya–sumber daya yang dimiliki agar dapat dirasakan manfaatnya dan dapat mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

1.5.4.2. Fungsi-fungsi Manajemen

Banyak ahli manajemen mengutarakan apa saja fungsi-fungsi manajemen sehingga seolah-olah tidak ada pembatasan yang jelas tentang fungsi-fungsi manajemen itu sendiri, akan tetapi apabila diperhatikan semua penjelasan yang dikemukakan oleh para ahli mengenai fungsi-fungsi manajemen mempunyai substansi yang sama, terutama dilihat dari tujuan manajemen sebagai ilmu dan sebagai seni.

Menurut Luther M. Gulich (dalam Athoillah 2010, 9), fungsi-fungsi manajemen yang bersifat universal, diantaranya:

1. *Planning* (perencanaan)

Perencanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program yang di dalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan, penentuan tujuan, kebijaksanaan, arah yang akan ditempuh, prosedur, dan metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan. Perencanaan adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang mungkin diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.

2. *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah suatu proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyamakan tugas serta fungsinya dalam organisasi. Proses pengorganisasian dilakukan dengan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci berdasarkan pada bidangnya masing-masing sehingga terintegrasi hubungan-hubungan kerja yang sinergis, kooperatif yang harmonis dan seirama dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

3. *Staffing* (penempatan tenaga kerja)

Staffing merupakan kegiatan yang sangat penting karena berhubungan dengan penempatan orang dalam tugas dan kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan penempatan orang berkaitan dengan manajemen personal.

4. *Directing* (pengarahan)

Directing atau pengarahan merupakan kegiatan organisasi yang berhubungan dengan pembinaan dan pelaksanaan instruksional para pemegang jabatan dalam organisasi. Kegiatan-kegiatan pengarahan berhubungan dengan adanya kekuasaan hierarkis dalam organisasi, sebagaimana seorang manajer, memberikan instruksi maupun perintah, dan saran-saran terhadap bawahannya. Pengarahan juga merupakan suatu teknik pelayanan yang tujuan utamanya mempelajari dan memperbaiki secara bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisasi.

5. *Controlling* (pengkoordinasian)

Controlling atau pengkoordinasian adalah penyatuan dan penyelerasaan semua kegiatan. Tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang bermacam-macam, sehingga memerlukan koordinasi dari seorang pemimpin. Koordinasi yang baik dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat atau kesimpangsiuran dalam tindakan. Koordinasi yang baik akan membuat semua bagian dan personal dapat bekerja sama menuju ke satu arah tujuan yang telah ditetapkan.

6. *Reporting* (pelaporan)

Reporting atau pelaporan adalah salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi.

7. *Budgeting* (penganggaran)

Menurut Handoko (2011:377) anggaran adalah laporan-laporan formal sumber daya keuangan yang disisihkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu selama periode waktu yang ditentukan. Anggaran menunjukkan pengeluaran, penerimaan, atau laba yang direncanakan di waktu yang akan datang. Anggaran mencerminkan sasaran, rencana, dan program-program organisasi yang dinyatakan dalam bentuk bilangan angka-angka perencanaan menjadi standar di mana dilaksanakan di waktu yang akan datang dapat diukur.

1.5.5. Pemberdayaan Masyarakat

1.5.5.1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*empowerment*” yang mempunyai arti dasar yakni “kekuatan”, dapat diartikan bahwa pemberdayaan merupakan pemberian daya atau kekuatan kepada individu maupun kelompok lemah agar dapat hidup mandiri terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, rumah, pendidikan, dan kesehatan. Pemberian daya kepada individu maupun kelompok lemah merupakan tanggungjawab dari pemerintah namun juga harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terutama dari masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan (Hamid, 2018:18).

Menurut Suharto (dalam Mulyawan 2016, 49) pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Pemberdayaan berkaitan dengan kemampuan dalam kelompok yang rentan dan lemah. Suharto berpendapat bahwa pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjangkau sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatan, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Menurut Mardikanto dan Soebito (2013:61) pemberdayaan masyarakat merupakan rangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan untuk bersaing) kelompok lemah termasuk di dalamnya individu-individu dalam masyarakat yang mengalami permasalahan ekonomi. Menurut Sutoro 2015 (dalam Mulyawan, 2016:50) pemberdayaan menempatkan masyarakat bukan sebagai objek penerima manfaat dari pihak luar, tetapi sebagai subjek yang mampu untuk mandiri. Pemberdayaan juga diartikan

sebagai respon terhadap ketidakmampuan dan ketidakberdayaan masyarakat. Keberhasilan dari pemberdayaan masyarakat menurut Sumodinngnat (1999:138) dapat dilihat dari:

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin,
- b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia,
- c. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin,
- d. Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota kelompok, semakin kuatnya permodalan kelompok, serta semakin luasnya interaksi kelompok lain dalam masyarakat, dan
- e. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasar.

Berdasarkan definisi mengenai pemberdayaan menurut para ahli penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk memandirikan masyarakat lemah agar lebih memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan pendapatan, dan ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia. Pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai subjek bukan objek, sehingga masyarakat mampu untuk mandiri dan tidak bergantung pada pemberian bantuan dari pihak luar.

1.5.5.2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat yaitu untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah karena tidak berdaya, hal tersebut disebabkan dari kondisi internal (persepsi sendiri) maupun kondisi eksternal (penindasan oleh oknum yang tidak berlaku adil). Adapun menurut Mardikanto (2014:202) terdapat enam tujuan dari pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

1. Perbaikan Kelembagaan.

Perbaikan kegiatan atau tindakan diharapkan mampu untuk memperbaiki kelembagaan termasuk perbaikan dan pengembangan jejaring kemitraan usaha. Kelembagaan yang baik dapat mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kelembagaan yang ada, sehingga lembaga dapat menjalankan fungsinya dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan.

Lembaga yang baik merupakan lembaga yang mempunyai visi misi tujuan yang jelas, sasaran yang dapat diukur, dan program kerja yang jelas dan terarah. Lembaga yang baik mempunyai anggota yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang didistribusikan kepada masing-masing anggota secara jelas di setiap periode tertentu sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Setiap anggota mempunyai kesadaran dan peran untuk memajukan lembaga yang bersangkutan. Para anggota dapat saling memberikan motivasi untuk selalu meningkatkan kemampuannya melalui pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan.

2. Perbaikan Usaha

Setelah adanya perbaikan kelembagaan, diharapkan berpengaruh pada adanya perbaikan usaha dari lembaga. Kegiatan dari perbaikan kelembagaan diharapkan akan mampu untuk memperbaiki usaha/bisnis sehingga dapat memberikan kepuasan kepada anggota lembaga tersebut dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di lingkungan kelembagaan tersebut. Perbaikan usaha juga diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh anggota yang bersangkutan.

3. Perbaikan Pendapatan

Perbaikan usaha diharapkan akan berdampak pada peningkatan pendapatan dari anggota lembaga. Dengan kata lain perbaikan usaha yang dilakukan dapat memperbaiki pada pendapatan yang didapatkan, termasuk pada pendapatan keluarga dan masyarakat. Perbaikan usaha juga diharapkan akan dapat menjaga stabilitas ekonomi yang bertujuan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

4. Perbaikan Lingkungan

Disadari atau tidak masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melakukan aktivitas ekonomi dapat mengakibatkan pada kerusakan lingkungan. Kerusakan pada lingkungan tidak hanya mengancam pada dirinya sendiri akan tetapi juga dapat mengancam kehidupan generasi yang akan datang. Perbaikan lingkungan contohnya yaitu pada saat akan mendirikan pabrik harus mengadakan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dengan memperhatikan pembuangan limbah pabrik. Pemilik pabrik harus bertanggungjawab terhadap limbah pabrik agar tidak membuang limbah ke sungai atau jalan yang dapat menyebabkan lingkungan sekitar menjadi tercemar dan bisa membahayakan kesehatan masyarakat.

5. Perbaikan Kehidupan

Tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat dari indikator atau berbagai faktor. Diantaranya tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan atau daya beli masing-masing keluarga. Membaiknya pendapatan diharapkan juga akan membawa pada keadaan lingkungan yang juga membaik. Pada akhirnya pendapatan dan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

6. Perbaikan Masyarakat

Ketika mempunyai tingkat kehidupan yang membaik, maka akan menghasilkan kehidupan kelompok masyarakat yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik didukung oleh lingkungan fisik dan sosial yang lebih baik, sehingga diharapkan akan terwujud kehidupan bermasyarakat yang lebih baik.

Menurut Ambar Sulistiyanti (2004:80) tujuan pemberdayaan masyarakat adalah menjadikan masyarakat mandiri yang meliputi mandiri berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang dilakukan. Kemandirian masyarakat dapat dilihat dari kemampuan masyarakat untuk memikirkan, memutuskan, dan melakukan tindakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, efektif dengan pengarahan sumber daya yang dimiliki.

Menurut Suharto (2014:60) tujuan dari pemberdayaan adalah keadaan atau hasil yang ingin dicapai yaitu masyarakat menjadi berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas.

Berdasarkan pendapat yang disampaikan, penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya pemberdayaan masyarakat menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat dengan adanya kemandirian masyarakat yang mempunyai tujuan untuk terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mendorong program-program pembangunan dengan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Kaligono Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia di dalamnya.

1.5.5.3. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Pencapaian dari tujuan pemberdayaan masyarakat tentunya dibutuhkan tahap-tahap yang dilaksanakan, Isbandi Rukminto Adi (2002:182) menjelaskan tahap-tahap pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dibagi menjadi dua yaitu persiapan petugas dan persiapan lapangan

- a. Tahap persiapan petugas, tahap ini mempunyai tujuan yaitu menyamakan persepsi antar anggota tim sebagai agen perubahan mengenai langkah yang diambil dalam pemberdayaan kepada masyarakat

- b. Persiapan lapangan, petugas harus melakukan penyiapan lapangan dengan melakukan studi kelayakan terhadap daerah dan masyarakat yang akan dijadikan sebagai sasaran pemberdayaan. Pada tahap ini petugas menjalin hubungan dengan pihak sasaran pemberdayaan agar dapat memperoleh bentuk kegiatan yang akan diambil agar dapat dirasakan secara nyata.

2. Tahap *Assessment*

Proses *assesment* dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat dengan melibatkan masyarakat atau tokoh masyarakat sebagai perwakilan. Petugas pemberdayaan juga memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang akan ditindak lanjuti pada tahap berikutnya. Pada tahap ini petugas pemberdayaan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan) dan juga sumberdaya yang dimiliki masyarakat.

3. Tahap Perencanaan Alternatif Program

Tahap ini melibatkan partisipasi masyarakat untuk berfikir mengenai masalah yang sedang dihadapi dan bagaimana untuk mengatasinya. Masyarakat diharapkan mampu untuk memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat mereka lakukan. Program alternatif tentunya disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai agar program tidak bersifat insidental ataupun amal yang tentunya tidak dapat dilihat manfaatnya dalam jangka panjang.

4. Tahap Pemformulisan Rencana Aksi

Petugas pemberdayaan bersama masyarakat untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan guna mengatasi masalah yang dihadapi. Pada

tahap ini diharapkan petugas dan masyarakat mampu untuk merumuskan tujuan yang akan dicapai dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.

5. Tahap Pelaksanaan Program

Tahap pelaksanaan program merupakan tahap yang paling krusial, karena program yang telah direncanakan dengan baik dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan. Peran masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program.

6. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi digunakan untuk melakukan proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program pemberdayaan yang sedang berjalan. Pengawasan sebaiknya melibatkan masyarakat karena dapat terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal. Sehingga dalam jangka panjang dapat membentuk sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Evaluasi terkadang menemukan hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pada tahap evaluasi diharapkan mampu untuk memberikan umpan balik sehingga dapat dilakukan *assessment* terhadap permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat. Evaluasi dapat dilakukan pada input, proses (monitoring) dan juga pada hasil.

7. Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahap selesainya hubungan secara formal antara petugas dengan sasaran pemberdayaan. Pada tahap ini tidak jarang ditemukan bukan karena masyarakat dianggap sudah mandiri, akan tetapi karena sudah melebihi waktu yang telah ditetapkan, atau karena anggaran sudah selesai atau karena faktor lainnya.

Ambar Teguh (dalam Aziz, 2012:33) juga mengemukakan pendapatnya mengenai tahap-tahap pemberdayaan membagi menjadi 3 tahapan yaitu:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku

Pemberdayaan perlu untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat yang menerima agar dapat meningkatkan kapasitas diri. Sasaran pemberdayaan harus diberikan kesadaran mengenai perlunya perubahan agar dapat mengubah keadaan ke tingkat yang lebih sejahtera. Pemberian kesadaran kepada sasaran pemberdayaan akan dapat mengubah pemikiran dan perilaku mereka agar memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

2. Transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan

Pemberian pengetahuan dan kecakapan keterampilan dapat mendukung pemberdayaan yang dilaksanakan karena sasaran pemberdayaan akan memiliki pengetahuan yang lebih baik dan lebih memiliki keterampilan tambahan dari potensi yang dimiliki, sehingga nantinya pemberdayaan akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

3. Peningkatan intelektual dan kecakapan keterampilan

Tahap peningkatan intelektual dan kecakapan keterampilan mengarahkan kepada sasaran pemberdayaan untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki, meningkatkan kemampuan dan kecakapan keterampilan yang pada intinya mempunyai tujuan yaitu untuk memandirikan sasaran pemberdayaan.

Menurut Tim Delivery Mardikanto dan Soebiato (2012:125) pemberdayaan masyarakat melalui tahapan – tahapan sebagai berikut :

1. Seleksi lokasi / wilayah

Seleksi lokasi atau wilayah dilakukan dengan penetapan kriteria yang telah menjadi kesepakatan antara lembaga, pihak terkait, dan masyarakat, penetapan kriteria penting agar penetapan lokasi atau wilayah dilakukan sebaik mungkin agar tujuan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai sesuai dengan harapan.

2. Sosialisai pemberdayaan

Pemberian sosialisasi dapat membantu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pihak terkait mengenai program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan.

3. Proses pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat ditujukan agar masyarakat dapat mandiri. Proses pemberdayaan masyarakat agar dapat berjalan, maka terlebih dahulu dengan memberikan pelatihan untuk menambah pengetahuan, keterampilan, serta perubahan sikap dan wawasan.

4. Pemandirian Masyarakat

Pemandirian masyarakat dilakukan dengan pendampingan agar masyarakat dapat mengelola sendiri kegiatan pemberdayaan. Pada awal pendampingan diperlukan keaktifan dari pihak pengelola tetapi lama-lama akan berkurang apabila masyarakat dirasa sudah mampu untuk melanjutkan kegiatannya sendiri. Titik fokus pada tahap pemandirian adalah hendaknya sudah dibahas sejak awal mulainya kegiatan yaitu pada saat tahap sosialisasi dan identifikasi masalah antar pendamping dengan masyarakat,

masyarakat diharapkan termotivasi dengan program yang akan dilaksanakan dan bereperan secara aktif, serta masyarakat diharapkan mampu untuk merasakan bahwa program yang telah disepakati bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dijelaskan mengenai tahap-tahap pemberdayaan masyarakat, peneliti memberikan kesimpulan bahwa tahap-tahap pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan menjalin kerjasama antara petugas pemberdayaan masyarakat dengan masyarakat sebagai sasaran dalam pemberdayaan hal tersebut dilaksanakan agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. Penulis dalam hal ini menggunakan teori tahap-tahap pemberdayaan masyarakat melalui empat tahap yaitu a) tahap seleksi lokasi/wilayah, b) tahap sosialisasi c) tahap pelaksanaan program, dan d) tahap evaluasi. Keempat tahapan pemberdayaan masyarakat tersebut sesuai dengan tahapan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Kaligono Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo.

1.5.5.4. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Edi Suharto (2009:67) pelaksanaan proses pemberdayaan agar mencapai tujuan yang diinginkan melalui penerapan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dapat disingkat dengan 5p yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Penjelasan mengenai lima pendekatan tersebut sebagai berikut:

- a. Pemungkinan (*Enabling*) adalah usaha untuk menciptakan iklim yang dapat memungkinkan potensi yang ada di dalam masyarakat dapat berkembang secara optimal. Pemberdayaan masyarakat harus mampu untuk membebaskan masyarakat dari batasan-batasan kultural dan struktural yang dapat menghambat.

- b. Penguatan (*Empowering*) adalah kegiatan untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat harus mampu untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang dapat menunjang kemandirian masyarakat.
- c. Perlindungan (*Protecting*) adalah melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat dalam masyarakat, menghindari persaingan yang tidak seimbang apalagi persaingan yang tidak sehat antara kelompok lemah dan kelompok kuat, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah di dalam masyarakat. Pemberdayaan masyarakat diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d. Penyokongan (*Fostering*) adalah pemberian bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu untuk menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu untuk menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan (*Maintaining*) adalah pemeliharaan kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan penyebaran kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Berdasarkan pendapat dari Edi Suharto dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui lima pendekatan yaitu pemungkinan dengan menciptakan iklim yang dapat mengembangkan potensi dalam masyarakat. Penguatan yaitu memperkuat pengetahuan dan

kemampuan masyarakat agar dapat terciptanya kemandirian. Perlindungan yaitu pemberian perlindungan kepada masyarakat lemah agar tidak terdiskriminasi dan tereksplorasi oleh kelompok kuat. Penyokongan yaitu bimbingan dan dukungan kepada masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam kondisi yang semakin lemah. Pemeliharaan yaitu memelihara situasi yang kondusif agar terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara yang lemah dan yang kuat.

1.5.6. Desa Wisata

Desa wisata adalah suatu bentuk kesatuan dan atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Atraksi dalam hal ini bisa berupa seluruh kehidupan keseharian masyarakat desa setempat dengan lokasi fisik yang bisa mengundang wisatawan untuk bercampur dengan kehidupan tersebut. Sementara akomodasi yang dimaksud bisa berupa sebagian tempat tinggal penduduk setempat dan unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk dan lainnya (Anjani, 2007:26).

Desa wisata merupakan suatu wilayah pedesaan yang memiliki keunikan dan daya tarik wisata yang khas (baik berupa daya tarik / keunikan fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan), yang dikelola dan dikemas secara alami dan menarik dengan pengembangan fasilitas pendukung wisata dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan terencana sehingga daya tarik pedesaan tersebut mampu menggerakkan kunjungan wisatawan ke desa tersebut, serta menumbuhkan aktivitas ekonomi pariwisata yang meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat (Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014:26).

Berdasarkan pendapat yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang mempunyai keunikan dan daya tarik wisata seperti keunikan alam, makanan khas, kehidupan sosial budaya masyarakat. keunikan dan daya tarik desa wisata yang dikelola secara alami dan menarik dengan pengembangan fasilitas pendukung sehingga daya tarik pedesaan dapat menarik kunjungan wisatawan ke desa tersebut.

1.5.7. Pengembangan Desa Wisata

Kemampuan dan tingkat penerimaan dari masyarakat desa yang akan dikembangkan menjadi desa wisata merupakan suatu hal yang harus diperhatikan sebagai langkah pengembangan desa wisata. Perhatian terhadap kemampuan dan penerimaan dari masyarakat dimaksudkan agar dapat mengetahui karakter dan kemampuan dari masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai program pengembangan desa wisata serta dapat mengetahui jenis dan tingkat dari pemberdayaan masyarakat sehingga dapat dirasakan manfaatnya. Menurut Soemarno (2010:3-4) pengembangan desa wisata agar dapat diwujudkan secara baik dapat dilakukan dengan melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunsan sumber daya manusia harus dipersiapkan agar pengembangan desa wisata dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan, pembangunsan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, mengikuti seminar yang membahas mengenai desa wisata, diskusi, dan lain sebagainya yang menyangkut bidang kepariwisataan.

b. Pola kemitraan atau kerjasama

Kemitraan atau kerjasama yang dapat dijalin agar dapat saling menguntungkan antara pihak pengelola desa wisata dengan para pihak yang memiliki usaha pada bidang pariwisata atau pihak pembina desa wisata dalam hal ini pihak dinas pariwisata daerah. Bidang-bidang yang dapat dikerjakasikan antara lain dalam bidang akomodasi, perjalanan, promosi, pelatihan, dan lain sebagainya yang menyangkut pariwisata.

c. Kegiatan pemerintah desa

Kegiatan pemerintah desa dalam rangka pengembangan desa wisata dapat dilakukan dengan rapat-rapat dinas, pameran pembangunan, dan upacara-upacara besar yang diselenggarakan di kawasan desa wisata

d. Promosi

Desa wisata agar dapat menarik wisatawan diperlukan promosi yang massif dari berbagai media, untuk itu pengelola desa wisata harus rajin untuk membuat konten yang berisikan kegiatan ataupun spot foto yang dapat menjadi daya tarik wisatawan.

e. Festival atau pertandingan

Festival atau pertandingan harus diadakan secara rutin agar dapat menarik wisatawan dari penduduk desa lain agar tertarik untuk mengunjungi desa wisata tersebut.

f. Membina organisasi masyarakat

Peran aktif dari organisasi masyarakat yang bergelut di bidang pariwisata sangat diperlukan untuk pengembangan desa wisata. Organisasi masyarakat dapat dijadikan sebagai wadah agar dapat mempermudah dalam menyatukan visi bersama dalam membangun desa wisata serta dapat dibagi peran masing-masing lembaga yang ada di dalam desa wisata.

g. Kerjasama dengan universitas

Lembaga pendidikan perguruan tinggi mempunyai peran penting dalam percepatan pengembangan desa wisata, karena dalam pengembangan desa wisata agar dapat berjalan dengan baik perlu untuk melakukan pengkajian terlebih dahulu yang dilakukan oleh perguruan tinggi, dan hasil dari kajian yang dilakukan oleh perguruan tinggi dapat dijadikan acuan untuk ditindaklanjuti agar tujuan dari pengembangan desa wisata lebih cepat tercapai.

1.6. Operasionalisasi Konsep

Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Kaligono Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo dimaksudkan agar dapat meningkatkan pendapatan, meningkatkan keterampilan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan kemandirian kepada masyarakat agar tidak bergantung pada pemerintah maupun kepada pihak yang memberikan bantuan kepada masyarakat dengan memanfaatkan potensi desa dan sumber daya yang tersedia di dalamnya. Tujuan tersebut tentunya tidak serta merta langsung tercapai, akan tetapi harus melalui tahap-tahap yang harus dijalankan. Tahap-tahap dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Kaligono melalui empat tahapan yaitu:

a. Tahap seleksi lokasi atau wilayah

- Penetapan kriteria lokasi/wilayah pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa dengan melibatkan tokoh masyarakat
- Penetapan lokasi/wilayah pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata oleh pemerintah desa dan tokoh masyarakat

b. Tahap sosialisasi

Indikator sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Kaligono yang akan dilihat dari:

- Masyarakat Desa Kaligono memahami program, tujuan, kegiatan dan peran dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat.

c. Tahap Pelaksanaan Program

- Pemerintah desa memberikan penyadaran kepada masyarakat
- Pemerintah desa memberikan peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan Desa Wisata Kaligono.
- Melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan pengembangan Desa Wisata Kaligono
- Partisipasi masyarakat dalam kepengurusan Kelompok Sadar Wisata dan Badan Pengelola Desa Wisata
- Kerjasama dengan pihak luar yang bergerak di bidang pariwisata untuk meningkatkan daya tarik wisatawan

d. Tahap Evaluasi

- Monitoring dan evaluasi oleh pemerintah desa terhadap program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Kaligono
- Evaluasi kegiatan pengelolaan dan pengembangan desa wisata oleh kelompok sadar wisata dan badan pengelola desa wisata

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Desain Penelitian

Suatu penelitian terbagi menjadi dua kelompok yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Kaligono Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo” ini menggunakan perspektif penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian kualitatif menurut (Moleong, 2012:6) merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini juga dilakukan secara ilmiah, apa adanya serta tidak dimanipulasi dan penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu melakukan reinterpretasi tentang keadaan fenomena sosial yang terdapat pada permasalahan yang diteliti. Menurut Marshal dalam (Jonathan 2006) mengemukakan bahwa “penelitian kualitatif sebagai proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia”. Metode deskriptif menurut (Nazir 2013, 43), menjelaskan “metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”.

Desain penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan yang ada di lapangan dengan menjelaskannya dan menghubungkan sebab akibat masalah tersebut terjadi untuk memperoleh gambaran realitas mengenai “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Kaligono Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo”.

1.7.2. Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat atau lokasi dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian kualitatif merupakan studi yang berlangsung dalam situasi ilmiah, dalam artian bahwa peneliti tidak melakukan manipulasi latar (setting) penelitian. Situs penelitian ini adalah Desa Wisata Kaligono.

1.7.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan suatu hal yang penting kedudukannya yang digunakan dalam pengumpulan data baik berupa benda maupun manusia. Subjek penelitian merupakan suatu fokus yang akan diteliti kemudian hari.

Sesuai dengan judul penelitian yang diangkat maka subjek dalam penelitian ini yaitu, antara lain

1. Kepala Desa Kaligono,
2. Badan Pengelola Desa Wisata Kaligono,
3. Kelompok Sadar Wisata, dan
4. Masyarakat Desa Kaligono.

Peneliti dalam menentukan subjek penelitian dengan menggunakan teknik *purposive* dan teknik *accidental* dengan menyesuaikan peruntukannya. Teknik *purposive* digunakan dalam penentuan subjek penelitian seperti Kepala Desa Kaligono, Badan Pengelola Desa Wisata Kaligono, dan Kelompok Sadar Wisata Desa Kaligono, sedangkan teknik *accidental* digunakan dalam menentukan subjek penelitian yaitu masyarakat Desa Kaligono.

Sugiyono (2015:218) teknik *purposive* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan kriteria tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang objek penelitian sehingga memudahkan peneliti untuk menjelajahi situasi sosial yang diteliti. Menurut Sugiyono (2015:122) teknik *accidental* adalah teknik menentukan sampel

sebagai bagian instrumen penelitian berdasarkan kondisi kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan ditemui cocok sebagai sumber data.

1.7.4. Jenis Data

Sugiyono (2015:13) menjelaskan jenis data dalam penelitian terdiri dari data kuantitatif, kualitatif, dan gabungan diantara keduanya. Data kualitatif merupakan data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, dan tulisan. Data kuantitatif pada prinsipnya merupakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dimana peneliti berperan sebagai instrumen penelitian itu sendiri. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data berupa kalimat-kalimat penjelas, berupa tulisan, maupun pendeskripsian kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan atau dengan kata lain jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bentuk deskriptif.

1.7.5. Sumber Data

Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2016:157) memberikan penjelasan secara spesifik bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif merupakan perkataan atau tindakan, selepas itu adalah berupa data tambahan seperti buku, dokumen, dan lain-lain. Berkaitan dengan hal tersebut, data menurut sumbernya terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2015:137), “data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Data yang diperoleh merupakan data yang diolah sendiri atau diperoleh langsung dari objeknya. Data yang diperoleh berupa jawaban atas daftar pertanyaan yang dilakukan selama proses wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data yang didapat dari hasil wawancara dengan

subjek penelitian yaitu Kepala Desa Kaligono, Badan Pengelola Desa Wisata Kaligono, Kelompok Sadar Wisata Desa Kaligono, dan Masyarakat.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2015:137) data sekunder merupakan “sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Tidak langsung memiliki maksud bahwa data yang diperoleh merupakan data yang bersumber dari objek atau dengan menggunakan dokumen-dokumen, buku, dan artikel pendukung lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan regulasi serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa wisata.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015:137), teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai cara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, teknik wawancara, teknik dokumentasi, dan studi kepustakaan.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Pengamatan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti untuk lebih mendalami subjek yang diteliti. Peneliti akan melakukan observasi di Desa Kaligono dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata.

2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada informan. Wawancara dilakukan dengan Kepala Desa Kaligono, Badan Pengelola Desa Wisata Kaligono, Kelompok Sadar Wisata Desa Kaligono, dan Masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mendokumentasikan keadaan pada saat observasi. Peneliti akan mendokumentasikan keadaan saat observasi di tempat yang ditentukan. Dokumentasi yang dilakukan peneliti merupakan dokumentasi saat dilakukan observasi di beberapa Desa Kaligono.

4. Studi Kepustakaan

Merupakan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan jurnal. Studi kepustakaan yang digunakan peneliti seperti artikel, buku, dan jurnal yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat maupun regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata.

1.7.7. Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Bungin (2007:154), “analisis data adalah gambaran atau informasi tentang peristiwa atas objek yang dikaji tetap mempertimbangkan derajat koherensi internal, masuk akal, dan berhubungan dengan peristiwa faktual dan realistik”. Analisis data merupakan bagian sangat penting di mana bagian ini merupakan bagian proses dari suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dari Miles dan Huberman (dalam Mutiara, 2019:65) yang menyatakan bahwa analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai selesai sehingga data yang dibutuhkan untuk mendukung

penelitian sudah jenuh. Aktivitas dalam metode ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun tahap-tahap penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat data-data yang dilakukan secara objektif dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan melalui observasi dan wawancara kepada subjek penelitian.
2. Reduksi data, kegiatan merangkum yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok dari data dan informasi yang telah diterima dan dikumpulkan, berfokus pada hal-hal yang penting, yang kemudian dicari tema dan polanya, yang kemudian memberikan penjelasan mengenai data serta memberikan kemudahan bagi peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya.
3. Kesimpulan, dalam penelitian kualitatif kesimpulan adalah suatu hal yang baru yang belum ada sebelumnya dalam penelitian lain. Temuan dalam penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang belum dijelaskan sehingga mempunyai potensi untuk memberikan jawaban dari fenomena sosial yang diteliti.

1.7.8. Kualitas Data

Menurut Moleong (2014:330) dalam bukunya “Metodologi Penelitian Kualitatif” terdapat teknik pemeriksaan standar keabsahan suatu data, di mana peneliti mengamnbil teknik triangulasi yang digunakan untuk teknik analisis data yang dapat dilakukan dengan cara:

1. Mengajukan berbagai pertanyaan dengan macam variasi,
2. Melakukan pengecekan data dengan berbagai sumber, dan
3. Memanfaatkan berbagai metode dengan harapan kepercayaan terhadap data lebih tinggi.

Teknik ini mengutamakan sebuah keefektifan proses dan hasil yang ditargetkan. Teknik ini juga menguji adanya kesesuaian antara metode dengan proses yang berjalan selama pengambilan

data. Analisis data menggunakan metode triangulasi dilakukan secara terus-menerus selama penelitian dan proses pengumpulan data. Menurut Moleong (2012:331), triangulasi merupakan “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain”.

Langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan teknik triangulasi mengutip dalam Moleong (2012:331) yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi,
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu,
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, dan

Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.